

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Hubungan internasional yang pada awalnya lebih mementingkan permasalahan keamanan dan konflik, kini telah meluas dan membahas mengenai isu-isu kontemporer. Menurut Rudy (2003), hubungan internasional pada awalnya bersifat *high-politics*, yaitu mengedepankan *hard power* untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Selain itu, dengan berakhirnya perang dingin juga menjadikan negara bukanlah satu-satunya aktor dalam Hubungan Internasional, tentu dengan semakin meluasnya isu internasional menyebabkan banyak pihak yang juga turut menyelesaikan permasalahan tersebut. Aktor non-negara yang sering memiliki pengaruh dalam isu Hubungan Internasional antara lain adalah *Intragovernmental Organization* (IGOs), *Non-governmental Organization* (NGOs), *Multinational Corporation* (MNCs) dan bahkan individu. Globalisasi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan semakin mudahnya pengintegrasian aktor-aktor yang ada dalam Hubungan Internasional. Dengan adanya globalisasi juga dapat mempengaruhi hubungan kerja sama antar aktor-aktor tersebut, di mana banyak sekali negara yang kemudian melakukan kerja sama dengan negara atau organisasi lain guna mencapai kepentingan nasionalnya.

Untuk menangani isu global yang terjadi saat ini, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan seluruh negara anggotanya menyusun agenda pembangunan berkelanjutan, yang disebut sebagai *Sustainable Development Goals* (SDGs), agenda ini muncul karena melihat keberhasilan dari *Millennials Development Goals* (MDGs) yang sudah berhenti pada tahun 2015 lalu, oleh karena itu SDGs ini juga sebagai lanjutan dari Agenda MDGs untuk melangkah lebih baik lagi dalam mengakhiri segala bentuk kemiskinan. Agenda SDGs ini mulai digagas dalam *UN Summit* pada September 2015, namun mulai diberlakukan secara resmi pada 1 Januari 2016, agenda yang memiliki 17 tujuan dan 169 target ini diharapkan dapat menjadi tuntunan dalam pembangunan untuk 15 tahun ke depan dan diharapkan dapat terealisasi di tahun 2030 nanti (Sustainable Finance OJK, 2017). Tidak hanya negara berkembang, seluruh negara anggota PBB diharapkan dapat turut serta dalam

RA. Lusika Mustikamaya, 2022

KERJASAMA UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID) DAN INDONESIA DALAM MENCAPAI SDGS TUJUAN AKSES AIR BERSIH DAN SANITASI: Studi Kasus Program USAID IUWASH PLUS Di Kabupaten Bogor

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

pengimplementasian program ini, karena dalam mengentaskan kemiskinan di dunia, dibutuhkan pembangunan dalam bidang lainnya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan memenuhi kebutuhan sosial, seperti kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan kesempatan kerja (UN, 2016). Tujuan dan target yang tertuang dalam SDGs meliputi tiga dimensi pembangunan keberlanjutan, yaitu ekonomi, lingkungan dan sosial, dan mencakup lima prinsip dasar, yaitu *planet* (bumi), *people* (manusia), *peace* (perdamaian), *prosperity* (kemakmuran), dan *partnership* (kerja sama) (Panuluh & Fitri, 2016).

Indonesia sebagai negara berkembang juga tentunya memiliki tanggung jawab atas terrealisasinya SDGs dan untuk mendukung agenda tersebut, maka Indonesia memiliki agendanya sendiri yang disebut sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Rancangan tersebut memiliki target yang telah disesuaikan dengan target yang terdapat dalam SDGs, selain itu RPJMN Indonesia memiliki target yang dapat berubah setiap lima tahun. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan RPJMN tahun 2015-2019 sebagai acuan, yang mana dalam rancangan tersebut terdapat 94 target SDGs yang diintegrasikan (Bappenas, 2020). Dengan adanya rancangan tersebut maka dapat digunakan oleh pemerintahan Indonesia, baik di pusat maupun daerah untuk mengaplikasikan program yang berkaitan dengan SDGs. Di Indonesia, aktor yang dapat berpartisipasi dalam SDGs antara lain, pemerintah dan parlemen, filantropi dan pelaku usaha, akademisi dan pakar, dan organisasi kemasyarakatan dan media, dengan banyaknya aktor yang tergabung maka diharapkan SDGs di Indonesia dapat terlaksana dengan baik (Bappenas, 2019).

Salah satu tujuan dalam SDGs yang juga mendapat perhatian besar oleh Indonesia adalah mengenai Air dan Sanitasi yang tertuang dalam poin No. 6, inti dari tujuan ini adalah untuk memberikan akses air bersih dan sanitasi yang layak bagi semua orang. Akses terhadap air bersih dan sanitasi sudah diakui oleh PBB menjadi salah satu bentuk hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu. Maka, dengan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar tersebut maka akan berdampak buruk terhadap beberapa aspek dalam kehidupan, kesulitan dalam mengakses air bersih dapat berpengaruh terhadap kesehatan, dan juga kondisi ekonomi individu tersebut. Selain itu, kondisi tersebut juga memiliki dampak yang signifikan bagi

RA. Lusika Mustikamaya, 2022

KERJASAMA UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID) DAN INDONESIA DALAM MENCAPAI SDGS TUJUAN AKSES AIR BERSIH DAN SANITASI: Studi Kasus Program USAID IUWASH PLUS Di Kabupaten Bogor

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

perwujudan hak asasi manusia lainnya. UN-Water mendefinisikan hak tersebut sebagai berikut (UN-Water, 2017):

Hak atas air memberikan hak kepada setiap orang untuk memiliki akses ke air yang cukup, aman, dapat diterima, dapat diakses secara fisik, dan terjangkau untuk penggunaan pribadi dan rumah tangga.

Hak atas sanitasi memberikan hak kepada setiap orang untuk memiliki akses fisik dan sanitasi yang terjangkau, dalam seluruh aspek kehidupan, semua orang memiliki hak untuk mengakses sanitasi yang aman, higienis, terjamin, serta dapat diterima secara sosial dan budaya serta memberikan privasi dan memastikan martabat.

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa semua orang berhak untuk dapat mengakses air bersih dan sanitasi layak dengan harga yang terjangkau. Bahkan berdasarkan laporan PBB mengenai keadaan air di dunia, lebih dari 5 miliar orang dapat menderita kekurangan air pada tahun 2050 karena perubahan iklim, meningkatnya permintaan dan persediaan yang tercemar. Berdasarkan pengertian tersebut juga maka dapat disimpulkan bahwa dengan akses air dan sanitasi yang buruk dapat mengancam kesejahteraan individu tersebut.

Berdasarkan Perpres RI No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Pemerintah Indonesia memiliki komitmen Sasaran Nasional RPJMN 2015-2019 tentang meningkatnya akses terhadap layanan air minum dan sanitasi yang layak pada tahun 2019 menjadi 100%. Berkaitan dengan sasaran RPJMN 2015-2019 tersebut, maka Pemerintah Indonesia membentuk program nasional yang disebut sebagai *Universal Access 2019*, yang mana dalam program nasional tersebut diharapkan bahwa 100% masyarakat Indonesia sudah dapat mengakses air minum yang bersih dan memiliki sanitasi yang layak pada tahun 2019, dan sebagai bentuk dukungan untuk komitmen tersebut maka dibentuklah gerakan 100-0-100, yang berarti 100% akses air minum, 0% luas kawasan kumuh perkotaan dan 100% akses sanitasi (air limbah, persampahan, dan drainase) (Kementerian PUPR, 2015). Berdasarkan *Public Expenditure Review Spending for Better Result* yang dikeluarkan oleh *World Bank* mengemukakan bahwa Indonesia masih tertinggal jauh dibanding negara-negara tetangganya dalam hal akses air bersih dan sanitasi (Ulya, 2020). Dalam laporan yang sama, *World Bank* juga menyatakan bahwa program 100-0-100

RA. Lusika Mustikamaya, 2022

KERJASAMA UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID) DAN INDONESIA DALAM MENCAPAI SDGS TUJUAN AKSES AIR BERSIH DAN SANITASI: Studi Kasus Program USAID IUWASH PLUS Di Kabupaten Bogor

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

yang ditetapkan oleh pemerintahan Indonesia lebih fokus pada tujuan MDGs, yang mana target tersebut tidak seketat target yang dimiliki oleh SDGs, sehingga dalam hal ini Indonesia tidak berhasil dalam mencapai tujuan 100-0-100 di tahun 2019 (World Bank, 2020).

Permasalahan air dan sanitasi di Indonesia masih menghadapi persoalan yang cukup parah menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018, terdapat sekitar 88% Rumah Tangga di Indonesia yang dapat mengakses air minum layak. Walaupun tetap meningkat setiap tahunnya namun masih terdapat selisih 32 juta jiwa penduduk yang belum dapat mengakses air minum layak (Kominfo, 2019). Dengan data tersebut maka Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan yang cukup besar.

BPS mencatat bahwa pada tahun 2019 persentase rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses sanitasi layak sebesar 77,39%, angka tersebut tentunya masih cukup jauh untuk dapat merealisasikan *Universal Access 2019*. Sedangkan, di tahun 2020, persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak sebesar 79,53%, angka tersebut naik sebesar 2,14% dari tahun sebelumnya. Selain itu, perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Indonesia masih cukup tinggi, yaitu sebesar 9,36% atau 25 juta jiwa dari total penduduk Indonesia, hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan perilaku BABS terbesar ketiga di dunia (PDAM Tirta Benteng, 2020).

Selain Indonesia, Amerika Serikat juga memiliki tanggung jawab yang besar atas tercapainya Agenda 2030, salah satunya di bidang air dan sanitasi. Pada tahun 2017, Amerika Serikat mengeluarkan *U.S. Global Water Strategy*, dalam strategi tersebut terdapat empat tujuan utama terkait dengan permasalahan akses air bersih dan sanitasi yang layak, tujuan tersebut yaitu (USAID, 2017):

1. Memajukan tingkat akses berkelanjutan terhadap layanan air minum dan sanitasi yang aman, serta penerapan perilaku bersih.
2. Memajukan tata laksana yang baik dan pemeliharaan sumber daya air tawar.
3. Memasarkan kerja sama untuk air bersama.
4. Memperkuat tata kelola, pendanaan, dan kelembagaan sektor air.

RA. Lusika Mustikamaya, 2022

KERJASAMA UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID) DAN INDONESIA DALAM MENCAPAI SDGS TUJUAN AKSES AIR BERSIH DAN SANITASI: Studi Kasus Program USAID IUWASH PLUS Di Kabupaten Bogor

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

Dalam mencapai tujuan tersebut, Amerika Serikat menginisiasi untuk memberikan bantuan teknis; melakukan investasi untuk pembangunan infrastruktur dan layanan yang berkelanjutan; memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; memobilisasi sumber daya keuangan; berpartisipasi dalam kegiatan diplomasi; dan, memperkuat kerja sama. *U.S. Global Water Strategy* ini didasarkan pada *The Senator Paul Simon Water for the World Act of 2014*, yaitu Undang-Undang yang dibentuk berdasarkan *Water for the Poor Act of 2005* yang menjadikan air, sanitasi dan higiene (WASH) sebagai prioritas kebijakan luar negeri AS. *Water for the World Act of 2014* menetapkan prinsip-prinsip proyek WASH untuk dapat memberikan dampak maksimal dengan berfokus pada negara-negara prioritas dan menekankan bahwa bantuan yang ada diberikan kepada negara-negara yang sangat membutuhkan program WASH (USAID, 2015).

Berdasarkan *Water for the World Act of 2014*, Indonesia menjadi salah satu negara prioritas tinggi bagi Amerika Serikat untuk diberikan bantuan terkait dengan *U.S. Global Water Strategy*. Terdapat lebih dari 17 lembaga dan departemen pemerintahan AS yang berpartisipasi dalam pengembangan strategi ini, salah satunya adalah USAID (*United States Agency for International Development*), yaitu sebuah lembaga independen Amerika Serikat yang berfokus dalam memberikan bantuan untuk pembangunan di sebuah negara. Hingga saat ini USAID memiliki tiga program yang sedang berlangsung di Indonesia terkait dengan permasalahan air dan sanitasi, salah satu program tersebut adalah IUWASH PLUS (*Indonesia Urban Water Sanitation and Hygiene – Penyehatan Lingkungan Untuk Semua*).

Sesuai dengan salah satu prinsip SDGs, yaitu *partnership*, maka dalam menangani permasalahan air dan sanitasi ini Indonesia ini membutuhkan kerja sama dengan pihak lain, dalam kasus ini Indonesia bekerja sama dengan USAID melalui program IUWASH PLUS, dan untuk menjalankan programnya USAID bekerja sama dengan instansi pemerintah dan donor, pihak swasta, *NGOs*, kelompok masyarakat dan mitra lainnya (IUWASH PLUS, n.d.). Hingga saat ini, USAID IUWASH PLUS telah melakukan kerja sama dengan 35 Pemerintah daerah yang tersebar di 8 Provinsi di Indonesia. Kerja sama antara USAID dan Pemerintah Daerah di Indonesia dikarenakan kurangnya akses air bersih dan sanitasi yang baik bagi masyarakat Indonesia, terutama sebagian besar masyarakat Indonesia masih tinggal di

RA. Lusika Mustikamaya, 2022

KERJASAMA UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID) DAN INDONESIA DALAM MENCAPAI SDGS TUJUAN AKSES AIR BERSIH DAN SANITASI: Studi Kasus Program USAID IUWASH PLUS Di Kabupaten Bogor

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

bantaran sungai yang tidak mementingkan kebersihan sanitasinya, ditambah dengan kondisi air sungai yang tercemar, baik karena sampah maupun limbah pabrik.

Salah satu provinsi yang juga menjadi mitra kerja sama USAID adalah Jawa Barat, yang meliputi lima Pemerintahan Daerah, yaitu Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang. Dalam menangani permasalahan sanitasi, Pemerintah Jawa Barat akan melaksanakan berbagai program berkaitan dengan masalah ini, antara lain adalah pengembangan sistem pengelolaan air limbah *off-site* (SPALT) di sembilan kota, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) skala pemukiman di 18 kabupaten, dan pembangunan *Septage Treatment Plant* (IPLT), dan pengadaan truk penyedotan, sedangkan untuk program non fisik, Pemerintah Jawa Barat akan memperkuat kelembagaan operator dan kelompok berbasis masyarakat, memacu komunitas, dan juga pengembangan kewirausahaan sanitasi. Sedangkan untuk mengatasi permasalahan air, Pemerintah Jawa Barat akan menjalankan program fisik seperti pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dan program non fisik seperti restrukturisasi PDAM dan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) (IUWASH PLUS, 2019).

Kabupaten Bogor menjadi salah satu mitra USAID dalam melaksanakan program IUWASH PLUS, kerja sama ini telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak sejak tahun 2017, yang bertujuan untuk pemenuhan target akses universal RPJMN 2015-2019 dan SDGs 2030. Wilayah Kabupaten Bogor merupakan wilayah terluas di Jawa Barat yang memiliki laju pembangunan industri yang cukup pesat, sehingga menyebabkan lebih dari 85% penduduknya tinggal di wilayah perkotaan. Namun, dengan tingginya perkembangan tersebut, Pemerintah Kab. Bogor belum dapat menyeimbangi dengan pemberian akses air bersih dan sanitasi yang layak bagi masyarakatnya (Andi, 2017).

Pada tahun 2019, Kabupaten Bogor menjadi daerah dengan jumlah praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) terbesar di provinsi Jawa Barat, di mana terdapat 527.705 Rumah Tangga dari 2.041.681 Rumah Tangga di Kabupaten Bogor (Nurulliah, 2019). Selain itu, berdasarkan data dari Open Data Kab. Bogor bahwa pada tahun 2018 terdapat 31.47% Persentase Jumlah Rumah Tangga yang belum terlayani sanitasi layak. Bahkan pada tahun

RA. Lusika Mustikamaya, 2022

KERJASAMA UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID) DAN INDONESIA DALAM MENCAPAI SDGS TUJUAN AKSES AIR BERSIH DAN SANITASI: Studi Kasus Program USAID IUWASH PLUS Di Kabupaten Bogor

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

2020, sanitasi di Kabupaten Bogor baru menginjak angka 74,02%, sedangkan persentase idealnya adalah 90%. Selain itu, masih tingginya kasus *stunting*, diare dan juga tipes di wilayah tersebut (Diskominfo Kab. Bogor, 2020). Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Bogor tahun 2020, bahwa baru sekitar 83,56% Rumah Tangga di Kab. Bogor yang memiliki fasilitas tempat buang air besar sendiri, sedangkan sebesar 16,44% masih menggunakan fasilitas bersama, seperti MCK Umum dan tidak menggunakan fasilitas buang air besar (BPS Kabupaten Bogor, 2020).

Selain itu, dengan pesatnya laju pembangunan industri di Kab. Bogor menyebabkan wilayah ini sangat mudah untuk mengalami kekeringan di musim kemarau, hal ini disebabkan karena kurangnya cadangan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Pada tahun 2020, Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Bogor mencatat bahwa terdapat 23.580 Kepala Keluarga atau sekitar 61.104 jiwa yang terkena dampak dari kekeringan yang tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Bogor (Sudarno, 2020). Krisis air bersih selalu dialami oleh masyarakat Kab. Bogor setiap musim kemarau, hal ini menyebabkan warga harus berjalan untuk mendapatkan air bersih yang layak dan menjadi bergantung dengan bantuan air bersih dari pemerintah daerah. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Bogor, bahwa masih terdapat 5,40% Rumah Tangga yang menggunakan sumur atau mata air tidak terlindung sebagai sumber air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan terdapat 2,28% Rumah Tangga yang bergantung pada air permukaan (sungai, danau, waduk, kolam, dan irigasi) dan air hujan (BPS Kabupaten Bogor, 2020).

I.2 Rumusan Masalah

Keterbatasan yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program SDGs membuat negara lain dan berbagai aktor non-negara untuk berkontribusi dalam pembangunan di Indonesia, salah satunya adalah Amerika Serikat. Melalui lembaga pemerintahannya, yaitu USAID melaksanakan sebuah program yaitu IUWASH PLUS (*Indonesia Urban Water Sanitation and Hygiene – Penyehatan Lingkungan untuk Semua*) yang mana program ini memiliki tujuan untuk membantu Pemerintah Indonesia melalui kerjasama langsung dengan Pemerintah Daerah dalam menciptakan akses air bersih dan sanitasi yang layak bagi masyarakatnya.

RA. Lusika Mustikamaya, 2022

KERJASAMA UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID) DAN INDONESIA DALAM MENCAPAI SDGS TUJUAN AKSES AIR BERSIH DAN SANITASI: Studi Kasus Program USAID IUWASH PLUS Di Kabupaten Bogor

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

Dari latar belakang yang telah saya rumuskan diatas, maka rumusan masalah yang penulis ambil untuk meneliti penelitian ini adalah **“Apa saja program kerja sama yang dilakukan oleh USAID dan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menangani permasalahan akses air bersih dan sanitasi melalui program IUWASH PLUS?”**

I.3 Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengidentifikasi jenis-jenis program yang dilakukan oleh USAID dan Pemerintah Kab. Bogor.
- b) Untuk menjelaskan kegiatan yang dilakukan oleh USAID dan Pemerintah Kab. Bogor berdasarkan program yang telah ada.
- c) Untuk menganalisis hasil dari program kerja USAID IUWASH PLUS dan keterkaitannya dalam pencapaian *Universal Access 2019* dan SDGs tujuan Air Bersih dan Sanitasi.

I.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan penulis mengenai Hubungan Internasional, khususnya dalam hal bagaimana suatu program kerja dan kegiatan kerja sama Internasional antara lembaga bantuan luar negeri dan pemerintah daerah dapat memberikan dampak bagi pembangunan sebuah daerah dan juga daerah.

b. Manfaat Praktis

1. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai bagaimana sebuah program kerja antara USAID dan Pemerintah Kab. Bogor dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan juga mencapai target *Universal Access 2019* dan SDGs tujuan air bersih dan sanitasi.
2. Dapat dijadikan informasi bagi pihak terkait yang menangani permasalahan ini, serta dapat memberikan informasi bagi masyarakat yang membutuhkan penelitian mengenai kerja sama USAID dan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menangani permasalahan akses air dan sanitasi layak.

I.5 Sistematika Penulisan

Dalam memberikan penjabaran lebih mengenai hasil dari penelitian ini, maka penulisan dibagi menjadi lima bab, yang mana setiap bab akan dilengkapi dengan sub bab yang berkaitan dengan pembahasan. Sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini berisikan mengenai latar belakang permasalahan dan juga rumusan masalah dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Selain itu, dalam bab ini penulis juga menjabarkan mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan mengenai penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai pembanding dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Selain itu, dalam bab ini berisikan mengenai kerangka pemikiran yang terdiri dari teori dan konsep yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis penelitian ini dan juga terdiri dari alur pemikiran dan asumsi.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ketiga ini akan menjabarkan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam menjalankan penelitian ini. Pada bab ketiga ini juga akan membahas mengenai waktu yang dibutuhkan dan juga lokasi dilaksanakannya penelitian.

BAB IV: KONDISI AKSES AIR BERSIH DAN SANITASI DI INDONESIA DAN KABUPATEN BOGOR

Pada Bab IV ini akan menjelaskan mengenai kondisi dan upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam memberikan akses air bersih dan sanitasi bagi masyarakatnya serta tinjauan umum terkait peran USAID di Indonesia. Bab ini juga akan menjelaskan mengenai kondisi masyarakat Kabupaten Bogor yang dapat mengakses air bersih dan sanitasi dan juga hambatan yang dihadapi pemerintahan kabupaten bogor dalam memberikan akses kepada masyarakatnya.

RA. Lusika Mustikamaya, 2022

KERJASAMA UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID) DAN INDONESIA DALAM MENCAPAI SDGS TUJUAN AKSES AIR BERSIH DAN SANITASI: Studi Kasus Program USAID IUWASH PLUS Di Kabupaten Bogor

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

BAB V: KERJASAMA USAID IUWASH-PLUS DAN KABUPATEN BOGOR

Bab ini berisikan mengenai bentuk kerja sama yang dilakukan oleh USAID IUWASH-PLUS dan pemerintahan kabupaten bogor dalam memberikan akses air bersih dan sanitasi yang layak bagi masyarakat 2017-2019. Bab kelima ini akan membahas mengenai Program IUWASH PLUS dan keterkaitannya dengan SDGs dan Universal Access 2019, bentuk kegiatan, dan juga hambatan dari kerja sama yang telah dilakukan oleh kedua aktor.

BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian. Dalam bab ini penulis juga akan memberikan saran terkait kerja sama dalam menangani permasalahan air bersih dan sanitasi yang telah penulis teliti.